



EDISI 28 OKTOBER 2023

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PEMROV KALTIM KOMITMEN TINGKATKAN STANDAR KETENAGAKERJAAN DI KALTIM



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim Dra Nina Dewi MAP saat membacakan sambutan PJ Gubernur Kaltim Dr. Akmal Malik, M.Si

PEMROV KALTIM KOMITMEN TINGKATKAN STANDAR KETENAGAKERJAAN DI KALTIM

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen akan terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia para pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di Pemprov Kaltim.

Peningkatan kualitas pengawas tenaga kerja sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kaltim. Oleh sebab itu Pemprov melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, kembali menggelar pelatihan bagi jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah provinsi Kaltim.

Hal ini dikatakan oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi saat pembukaan Pelatihan Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di lingkungan Pemprov Kaltim, pada Selasa (24/10/2023) di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim Pj Gubernur Kaltim, mengapresiasi kegiatan ini demi meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia para pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan di Pemprov Kaltim.

"Dalam dunia kerja yang terus berkembang dengan cepat, fungsi pengawasan ketenagakerjaan merupakan peran yang sangat penting," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri-PB Nomor 30 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Selain itu tugas pengawas ketenagakerjaan juga untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja dijaga dan keamanan serta kesehatan mereka di tempat kerja ter-

jamin. Dengan tugas yang sangat krusial ini, diperlukan peningkatan kompetensi dan keahlian yang terus menerus. Itulah sebabnya, pelatihan teknis bagi jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sangat penting," jelasnya.

Pj Gubernur berharap, dari pelatihan ini muncul pengawas-pengawas ketenagakerjaan yang profesional, kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan pembangunan kedepan.

"Seperti kita ketahui, tantangan kerja di masa depan dalam bidang apapun akan menjadi semakin berat. Terlebih dalam dunia ketenagakerjaan dengan kompleksitas permasalahan yang berkembang secara dinamis, pengawas ketenagakerjaan harus selalu siap menghadapi potensi perkembangan isu, seperti isu IKN dan isu pembangunan di Kaltim, serta masalah sehingga tercipta analisis masalah dan pemecahannya secara tepat," tutupnya. **(ADV/Han/BPSDM)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov Kalimantan Timur (Kaltim) Dra Nina Dewi MAP

PENTINGNYA TATA USAHA KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN BLUD

SAMARINDA - Penatausahaan keuangan dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah salah satu aspek yang sangat penting. Utamanya, dalam proses penilaian pengelolaan, pencatatan, pelaporan dan pengendalian keuangan yang melibatkan dana publik.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov Kalimantan Timur (Kaltim), Nina Dewi saat membuka acara Pelatihan Bendaharawan Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) angkatan 1 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Senin (18/9/2023) lalu di Gedung Serbaguna BPSDM Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang.

"Penata usahaan keuangan

yang BLUD merupakan landasan yang sangat penting untuk menjaga integritas keuangan dan operational BLUD serta untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Ini juga membantu dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik," kata Nina Dewi.

Pelatihan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan program belajar bagi tenaga pengelolaan keuangan, khususnya yang menduduki jabatan bendahara.

Pengeluaran pada lembaga Blud agar memiliki pengetahuan keterampilan dan sikap yang baik dalam melaksanakan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan pengeluaran APBD atau anggaran satuan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di akhir tanggapannya, Nina

berharap peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini sebaik-baiknya dan juga mengikuti pelatihan lain yang akan dilaksanakan BPSDM Provinsi Kaltim.

"Saya berharap para peserta tidak hanya sampai disini untuk mengembangkan diri, tapi terus proaktif mengikuti pelatihan BPSDM lainnya," tutupnya.

Diketahui dalam pelatihan ini, disampaikan materi-materi yang komprehensif dan relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh bendaharawan BLUD saat ini, dengan menggali berbagai aspek yang berkaitan dengan manajemen keuangan publik peraturan terkait dan praktik terbaik yang dapat membantu peserta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif. (adv)

Pewarta : Hanaf

Editor : Nicha Ratnasari



Sesi Foto bersama Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP, Staf Ahli Gubernur Bidang I Politik Hukum dan keamanan Ririn Sari Dewi SIP MSi beserta undangan dan peserta pelatihan.

BPSDM KALTIM GELAR PELATIHAN PELAYANAN NAKES HINGGA PENDAMPINGAN HUKUM BAGI ASN

SAMARINDA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (19/9/2023) lalu, telah menggelar 2 pelatihan sekaligus. Yakni, Pelatihan Pelayanan Prima dan Komunikasi Efektif bagi Tenaga Kesehatan (Nakes). Selain itu, Pelatihan Hukum Acara dan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta Layanan Pendampingan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum di Lingkungan Pemkab/Pemkot dan Provinsi Kaltim.

Pelatihan yang digelar Ruang Serbaguna Lantai 5 Hotel Fugo Big Mall Samarinda tersebut, rencananya akan digelar selama 5 hari, mulai 19 – 24 September 2023.

Kepala BPSDM Dra Nina Dewi sangat berharap dukungan seluruh perangkat daerah dalam menjamin kualitas SDM para ASN yang bekerja di instansi pemerintah.

“Kami berharap kerjasamanya agar semua kualitas ASN kita lebih berkualitas. Jadi petakan kebutuhan ASN kita agar tercapai kebutuhan waktu pelajaran ASN, karena tujuan peningkatan kualitas ASN tidak akan

tercapai jika tidak ada dukungan semua perangkat daerah,” tegasnya.

Staf Ahli Gubernur Bidang I Politik Hukum dan Keamanan Ririn Sari Dewi SIP MSi, memberikan sambutan sekaligus membuka acara pelatihan.

Hadir sekaligus membuka acara Staf Ahli Gubernur Bidang I Politik Hukum dan Keamanan, Ririn Sari Dewi yang sangat menyambut baik program pelatihan ini.

“Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan kedua pelatihan ini. Ini merupakan komponen yang sangat baik dan bisa menciptakan tatanan hukum yang lebih baik pelayanan kesehatan yang lebih efisien di wilayah kita,” katanya.

Ririn juga berharap semua peserta bisa mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh agar mampu mengaplikasikannya keilmuannya yang telah didapat dari pelatihan.

“Ikutilah pelatihan ini dengan sungguh-sungguh agar nanti bisa diaplikasikan dengan baik, dan atas izin Allah, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan dengan ini acara pelatihan secara resmi saya buka,” tutupnya. **(adv)**



Sesi Foto Bersama Peserta dan Pejabat BPSDM Kaltim

BPSDM Tutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 16 Tahun 2023, Siap Jadi Pejabat Pengawas Profesional

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyelesaikan tugas pengembangan sumber daya manusia bagi Aparat Negeri Sipil (ASN) dengan memberikan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Pelatihan ini telah mencapai Angkatan 16 Pemerintah Provinsi Kaltim, Kelas Kota Balikpapan, dan Kabupaten Paser.

Acara penutupan dilaksanakan, Rabu (27/9/2023) di Gedung Aula BPSDM Kaltim, Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang. Kegiatan pelatihan ini telah dimulai sejak tanggal 8 Juni hingga 27 September 2023, selama 104 hari kalender.

Rincian waktu pelatihan terdiri dari 86 hari Non Klasikal dan 18 hari Klasikal, yang dilaksanakan dengan metode yang menggabungkan pembelajaran online dengan tatap muka (blended learning).

Ketua Panitia Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, S.STP., M.M., dalam laporannya menyatakan bahwa peserta PKP kali ini berjumlah 40 orang, terdiri dari Pejabat Pengawas dari berbagai Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser.

"Jumlah peserta kita adalah 40 orang, terdiri dari pejabat pengawas dari Balikpapan dan Paser," ungkapnya.

Pelatihan PKP memiliki empat agenda utama dalam kurikulumnya, yaitu agenda Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara, agenda Kepemimpinan Pelayanan, agenda Pengendalian Pekerjaan, dan agenda Aktualisasi Kepemimpinan.

Hasil rapat penetapan kelulusan menyatakan bahwa peserta PKP Angkatan 16 Kelas Pemerintah Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser Tahun 2023 telah dinyatakan lulus 100%. "Hasil rapat menyatakan bahwa semua peserta lulus," pungkasnya.

Tidak lupa, Rina juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kesuksesan kegiatan PKP Angkatan 16 ini.

"Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas kebaikan saudara-saudara semua," tutupnya.

Dalam sambutan dan sekaligus menutup acara PKP, Kepala BPSDM Provinsi Kaltim, Dra. Nina Dewi, M.AP,

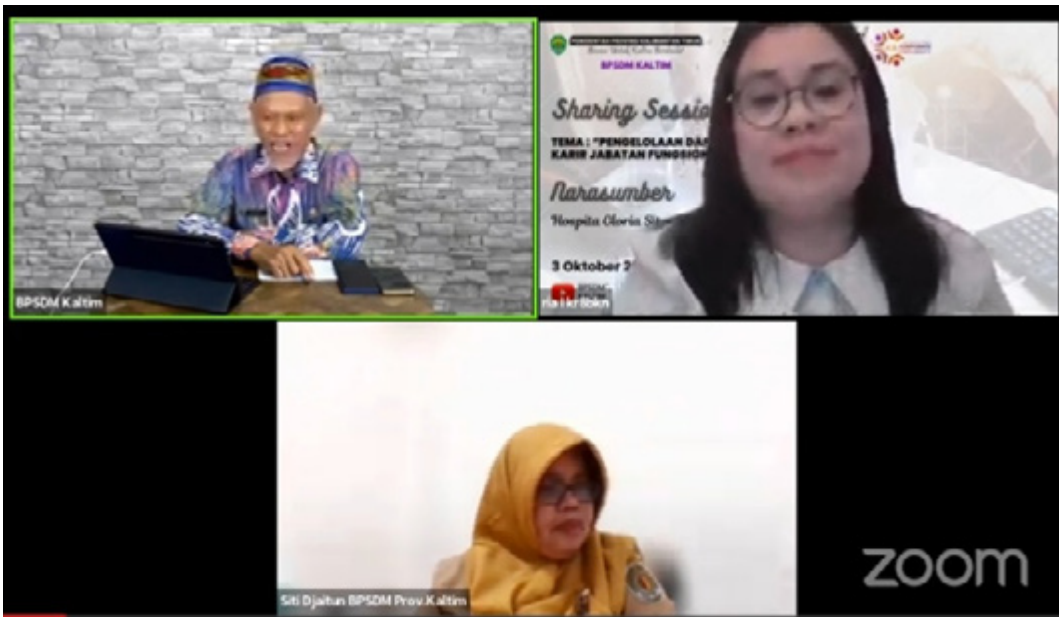
mengucapkan terima kasih kepada peserta pelatihan PKP BPSDM Kaltim yang telah menyelesaikan pelatihan dengan baik dan sungguh-sungguh serta berhasil dinyatakan lulus.

"Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah menyelesaikan pelatihan ini dengan baik dan sungguh-sungguh, menyelesaikan pendidikan, dan membentuk diri menjadi Pejabat Pengawas yang profesional," katanya.

Nina Dewi juga berharap dengan lulusnya para peserta dan pengetahuan baru yang mereka bawa dari pelatihan PKP ini, mereka dapat memberikan efek positif bagi perubahan dan dapat menjadi referensi yang dapat diimplementasikan untuk membantu kelancaran tugas mereka, terutama dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

"Jadilah aparatur berkinerja tinggi, yang turut berperan serta dalam kemajuan daerah dengan meningkatkan kinerja di tempat kerja, memberikan kemudahan kepada pemangku kepentingan, terutama kepada masyarakat," tutupnya. (ADV/Han)

**Pewarta: Hanafi
Editor: Agus Susanto**



Tampilan dari Kanal YouTube (dari kiri) Moderator Ir. H. Salman Lumoindong, MM dari Widyaswara BPSDM Provinsi Kaltim, Narasumber Hospita Gloria Situmorang, S.H.,M.AP, Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Regional Kalimantan, dan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Kaltim Siti Djaitun S.Sos MSI

BPSDM Kaltim Gelar Sharing Session Terkait Pengelolaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional ASN

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Sharing Session ke-43 dengan tema "Pengelolaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional" untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Kaltim dan Luar Kaltim pada hari Selasa (3/10/2023). Kegiatan yang disiarkan secara live di Channel YouTube BPSDM Kaltim ini dimulai pukul 10.00 Wita hingga 12.00 Wita.

Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi yang diwakilkan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Kaltim Siti Djaitun ini, dalam catatannya mengatakan BPSDM Kaltim berkomitmen dan berupaya untuk terus mengembangkan kapasitas ilmu pengetahuan ASN.

"Kami tetap optimis untuk terus meningkatkan kapasitas pengetahuan ASN salah satunya dengan menggelar metode sharing Session ini," ujarnya.

Dia berharap para peserta khususnya ASN fungsional bisa menyerap ilmu yang disajikan dalam sharing session ke-43 ini dengan

sebaik-baiknya, terutama ilmu dalam pengelolaan dan pengembangan karir jabatan fungsional.

"Kami berharap semua peserta terkhusus ASN dengan jabatan fungsional bisa mengambil ilmu pengetahuan ini dengan sebaik-baiknya," harapnya.

Kegiatan Sharing Session ini digelar secara daring menggunakan aplikasi Zoom untuk para peserta dan acara ini juga disiarkan secara langsung dari kanal YouTube BPSDM Kaltim untuk ditonton oleh masyarakat secara umum.

Pada Sharing Session kali ini menampilkan Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Regional Kalimantan Hospita Gloria Situmorang sebagai narasumber dan dimoderatori oleh Widyaswara BPSDM Kaltim Ir. H. Salman Lumoindong, MM.

Acara ini sejak di buka diikuti 301 peserta dan hingga berita ini diterbitkan sudah diputar 300 kali. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (SKPK) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim), Siti Djaitun S.Sos MSi.

KARIR ASN JABATAN FUNGSIONAL DITENTUKAN ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT

SAMARINDA - Seorang pejabat fungsional harus memahami peraturan yang menjadi landasan karirnya, karena jabatan fungsional sangat berbeda dengan jabatan administrasi maupun jabatan pimpinan tinggi, terutama dari segi kenaikan pangkatnya.

Hal ini dikatakan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (SKPK) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim), Siti Djaitun S.Sos MSi, saat Sharing Session ke-43 dengan tema Pengelolaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional yang digelar oleh BPSDM pada Selasa (3/10/2023) melalui aplikasi Zoom.

Siti menyebutkan, Jabatan Fungsional Merupakan Jabatan Karir Aparatur Sipil Negara yang bertu-

gas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Ketentuan Umum tentang Jabatan Fungsional ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional. Angka kredit ini diperoleh dari Predikat Kinerja yang dilaksanakan secara tahunan atau dilakukan secara periodik yang dapat dihitung secara proporsional. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai

salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

"Seorang pejabat fungsional naik pangkat dengan menggunakan angka kredit, berbeda dengan jabatan administrasi yang kenaikan pangkatnya reguler (4 tahun sekali)," ujarnya.

Peraturan ini dibuat lebih teknis agar mudah dipahami dan diimplementasikan sehingga dapat memberikan landasan bagi instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan Jabatan Fungsional.

"Dengan ditetapkannya peraturan ini, Jabatan Fungsional dapat bekerja secara terorganisir dan kolaboratif dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi," tutupnya. **(ADV/Han/BPSDM)**

Pewarta: Hanafi

Editor: Agus Susanto



Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP

Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Kepala BPSDM Kaltim Masuk 10 Besar dengan Nilai Sangat Memuaskan

SAMARINDA - Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Samarinda, menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II Angkatan 12 tahun 2023 yang digelar, Kamis (5/10/2023) di ruang auditorium Kantor Puslatbang KDOD LAN RI Samarinda.

PKN ke-12 tahun 2023 ini diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari lembaga pemerintahan pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota, diantaranya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemerintahan provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kubar, Kabupaten Kukar,

Kabupaten Kutim, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahulu, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Tampil sebagai perwakilan Pemprov Kaltim, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Kaltim Dra Nina Dewi MAP, disebutkan sebagai salah satu peserta yang masuk dalam 10 besar dengan kualifikasi sangat memuaskan

Pelepasan peserta PKN dilakukan oleh Kepala LAN RI Samarinda, Adi Suryanto, yang turut dihadiri Kepala Puslatbang KDOD LAN RI Samarinda, Muhammad Aswad dan juga oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik secara virtual.

Akmal Malik mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi

kepada para peserta PKN tingkat II angkatan 12 yang telah mengikuti pelatihan selama 4 bulan.

"Selamat kepada seluruh peserta, ini adalah capaian yang luar biasa dan saya sangat bangga melihat semangat dedikasi dan komitmen selama pelatihan ini" ujar Akmal Malik

PJ Gubernur Kaltim ini juga mengatakan PKN merupakan wadah yang sangat penting dalam mengembangkan potensi kepemimpinan para kader terbaik bangsa.

"Dan melalui pelatihan ini juga telah memberikan wawasan pengetahuan yang sangat berharga dalam mempersiapkan diri sebagai pemimpin yang tangguh dan berkualitas," pungkasnya.

(ADV)

Pewartu : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



(dari kiri) Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT dan Kepala Bidang PKMF BPSDM Kaltim Rina Kusharyanti, S.STP, MM.

BPSDM KALTIM DAN BKPSDM KOTA BONTANG SUKSES GELAR ORIENTASI PPPK UNTUK 4 ANGKATAN

SAMARINDA – Demi menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) gelar Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, angkatan 68, 69, 70, dan 71.

Acara yang sebelumnya dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor Jumat (29/9/2023) lalu, Kamis (5/20/2023) secara resmi ditutup Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT, di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim Jalan HM Rifadin, Samarinda Seberang.

Turut hadir pada agenda penutupan, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti mewakili Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, Kepala BKPSDM

Kota Bontang Sudi Priyanto.

Kepala Bidang PKMF BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti, menyebutkan pelaksanaan Orientasi PPPK ini hasil kerja sama antara BPSDM Kaltim dan BKPSDM Kota Bontang.

"Hari ini, telah dilaksanakan penutupan Orientasi PPPK dari 4 angkatan, dari pemerintah kota Bontang, kegiatan ini hasil dari kerjasama kami dengan BKPSDM Kota Bontang," ujarnya.

Dengan ditutupnya acara ini Rina berharap semoga peserta Orientasi PPPK Kota Bontang ini memahami peran tugas dan fungsi sebagai ASN PPPK.

"Semoga dapat lebih memahami peran dan fungsi ditempat kerja dapat lebih memahami SOPK dapat lebih memahami tugas PPPK yang merupakan ASN Pemkot Bontang," tutupnya. **(ADV)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT dan Kepala Bidang PKMF BPSDM Kaltim Rina Kusharyanti, S.STP, MM. Sesi Foto bersama peserta.

160 PPPK Ikuti Orientasi BPSDM Kaltim

SAMARINDA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang telah berhasil menggelar Orientasi 160 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

"Hari ini (kemarin, red) telah dilaksanakan penutupan Orientasi PPPK dari 4 angkatan, terdiri dari 160 PPPK dari pemerintah kota Bontang, kegiatan ini hasil dari kerjasama antara BPSDM Kaltim dan BKPSDM Kota Bontang," ujar Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM Kaltim, Rina Kusharyanti.

160 orang tersebut terbagi dari 4 angkatan yakni angkatan 68, 69, 70 dan 71. Setiap angkatan terdiri dari 40 orang PPPK, semua mengikuti orientasi pada 2 - 5 Oktober 2023 di Kantor BPSDM secara tatap muka atau

klasikal dan para peserta menginap selama 3 hari di Asrama yang ada di kompleks perkantoran BPSDM Kaltim, Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang.

Rina berharap semua ilmu yang telah didapat pada orientasi PPPK kali ini mampu diterapkan secara baik oleh 160 PPPK angkatan 68, 69, 70 dan 71.

"Semoga para peserta bisa memahami tugas dan peran serta fungsi dari PPPK itu sendiri," pungkasnya.

Acara yang sebelumnya dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor Jumat (29/9/2023) lalu di Hotel Mercure Samarinda, secara resmi ditutup Sekretaris Daerah Kota Bontang, Hj. Aji Erlynawati, MT, di Aula Utama Kantor BPSDM Kaltim Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang pada Kamis (5/20/2023).

Dalam acara penutupan hadir pula Kepala BKPSDM Kota Bontang Sudi Priyanto. **(ADV)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari